

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia telah menunjukkan kinerja yang baik dalam beberapa tahun terakhir. Melihat hasil laporan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh stabil dengan tingkat rata-rata 5,2 persen per tahun. Laju pertumbuhan yang kuat dan stabil telah memposisikan Indonesia sebagai negara yang memiliki bagian penting dalam perekonomian global.

Menurut Bank Dunia, perekonomian Indonesia akan terus bertahan hingga tahun 2020. Indonesia diprediksikan pada tahun 2025 akan mencapai pendapatan per kapita sekitar US\$ 14.900, dengan perkiraan penduduk mencapai 286 juta jiwa. Proyeksi optimis ini akan menempatkan Indonesia masuk dalam lima besar perekonomian dunia dengan PDB mencapai US\$ 4,25 triliun. Pada tahun 2017 Indonesia menempati ekonomi terbesar keempat di Asia Timur, setelah China, Jepang, dan India. Ekonomi terbesar ke-16 di dunia berdasarkan GDP (*Gross Domestic Product*) nominal. Ditahun 2017 total GDP Indonesia menembus US\$ 1,015 triliun atau sekitar Rp. 13.587,2 triliun untuk pertama kalinya dalam sejarah, sehingga semakin memantapkan Indonesia sebagai negara terbesar perekonomiannya di kawasan Asia Tenggara,

Indonesia juga masuk dalam jajaran Negara anggota *The Group of Twenty* (G-20). Berikut adalah daftar 20 negara menurut total GDP (US dolar):

		2017	2016	2015	2014
1	United States	19,485,393,853,000	18,707,188,235,000	18,219,297,584,000	17,521,746,534,000
2	China	12,143,491,448,186	11,137,945,669,351	11,015,542,352,469	10,438,529,153,238
3	Japan	4,859,950,558,539	4,926,667,087,368	4,389,475,622,589	4,850,413,536,038
4	Germany	3,656,749,414,477	3,466,790,065,012	3,360,549,973,889	3,883,920,155,292
5	United Kingdom	2,666,229,179,958	2,694,283,209,613	2,928,591,002,003	3,063,803,240,208
6	India	2,652,242,857,924	2,290,432,075,124	2,103,587,813,813	2,039,127,446,299
7	France	2,586,285,406,562	2,471,285,607,082	2,438,207,896,252	2,852,165,760,630
8	Brazil	2,053,594,973,993	1,796,275,437,088	1,802,214,373,741	2,455,994,050,149
9	Italy	1,956,960,611,691	1,875,579,883,543	1,835,899,237,320	2,159,133,919,744
10	Canada	1,646,867,220,617	1,526,705,529,135	1,552,899,925,234	1,801,480,123,071
11	Russia	1,578,624,060,588	1,282,723,881,134	1,363,594,369,578	2,059,984,158,438
12	Korea	1,530,750,923,149	1,414,804,158,515	1,382,764,027,114	1,411,333,926,201
13	Australia	1,330,135,756,844	1,208,846,993,740	1,351,693,984,525	1,467,483,705,132
14	Spain	1,309,309,642,308	1,232,076,017,362	1,195,119,269,972	1,369,398,844,600
15	Mexico	1,157,736,189,998	1,077,903,618,176	1,170,564,619,928	1,314,563,967,425
16	Indonesia	1,015,423,455,783	931,877,364,178	860,854,235,065	890,814,755,233
17	Turkey	852,676,778,301	863,721,648,069	859,796,872,678	934,185,915,386
18	Netherlands	831,809,944,961	783,528,181,705	765,264,949,781	890,981,311,078
19	Saudi Arabia	688,586,133,333	644,935,541,440	654,269,902,880	756,350,347,333
20	Switzerland	679,950,915,261	671,308,872,735	679,832,391,758	709,182,183,360

Sumber : Worldbank 2017 & Knoema.com

Gambar 1.1.
Daftar Negara menurut GDP (US dolar)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu bagian yang memiliki peranan sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. UMKM berkontribusi sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Menurut hasil survei ekonomi pada tahun 2016, bahwa UMKM berkontribusi sebesar 60,34 persen dari total Pertumbuhan Ekonomi Nasional, UMKM mampu menyediakan hingga 99 persen dari total lapangan kerja di Indonesia. UMKM memiliki peran penting dan menjadi pemain utama dalam kegiatan perekonomian Indonesia di berbagai sektor, sebagai penyedia lapangan kerja yang terbesar, sebagai motor penggerak dalam pengembangan

kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, dan mampu menciptakan pasar baru maupun sumber inovasi serta menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.¹ UMKM sangat besar potensinya untuk berkembang menjadi motor utama penggerak ekonomi bangsa.

UMKM juga telah membuktikan kekuatannya dalam menghadapi krisis moneter. Pada krisis moneter tahun 1998, UMKM tetap mampu bertahan ketika perusahaan-perusahaan besar waktu itu banyak yang mengalami gulung tikar menghadapi krisis tersebut. Bahkan pasca krisis moneter, UMKM memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat bahwa UMKM mampu menyediakan 89,2 persen total tenaga kerja pada tahun 2016. Hal ini sebelumnya juga sudah ditegaskan oleh *Asian Development Bank* (ADB) dalam pengamatannya di tahun 2014, bahwa UMKM berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi nasional di negara-negara Asia Pasifik dalam ketidakpastian maupun goncangan ekonomi global.²

Melihat potensi UMKM yang sangat besar tersebut keberadaan UMKM di Indonesia sangat membutuhkan peran serta dari berbagai pihak antara lain: pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat dan juga dunia usaha. Permasalahan yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM kemudian adalah berkenaan dengan pembiayaan atau permodalan. Pembiayaan bagi pelaku UMKM merupakan suatu yang dirasa sangat penting untuk pengembangan

¹ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: Kerjasama LPPI dengan Bank Indonesia, 2015), 23.

² Asian Development Bank, *SME Finance Monitor 2014*.

usaha mereka. Kebutuhan baik modal kerja maupun investasi diperlukan pelaku UMKM guna menjalankan usahanya dan meningkatkan permodalan.

Berbagai kebijakan dikeluarkan Pemerintah untuk memperkuat UMKM. Saat ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memudahkan akses perbankan adalah *financial inclusion* (keuangan inklusif). *Financial inclusion* adalah sebuah keadaan dimana seluruh masyarakat mempunyai akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³ Salah satu tujuan Pemerintah melakukan Program inklusi keuangan adalah membantu sektor UMKM agar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan untuk menjalankan bisnisnya sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan berimbas pada pertumbuhan perekonomian. Menurut Bank Indonesia, *financial inclusion* adalah upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara mudah baik yang bersifat harga maupun non harga.

Pada penyelenggaraan KTT G20 tahun 2010 di Toronto, Negara-negara menyepakati bahwa *financial inclusion* berkedudukan sebagai pilar dalam pembangunan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan di semua negara. Beberapa upaya juga telah dilakukan oleh pemerintah RI untuk mendorong dan mewujudkan *financial inclusion* di Indonesia. Presiden

³ Peraturan Presiden No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, (Jakarta: MENKUMHAM, 2016), 9-10.

Susilo Bambang Yudhoyono pada ASEAN Summit 2011 menyampaikan komitmennya untuk memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Kemudian ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia pada tahun 2012 bekerja sama dengan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Strategi ini berisi kerangka kerja, implementasi dan langkah ke depan pelaksanaan keuangan inklusif. Strategi keuangan inklusif/*financial inclusion* dijabarkan dalam 6 pilar strategi nasional keuangan inklusif.⁴

Dalam peraturan presiden No.82 tahun 2016 menjelaskan 6 pilar strategi nasional keuangan inklusif antara lain: Pertama edukasi keuangan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan. Kedua fasilitas keuangan publik, artinya peran pemerintah dalam menyediakan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun tidak langsung guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketiga pemetaan informasi keuangan, yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat yang awalnya tidak layak menjadi layak dalam memperoleh layanan keuangan. Keempat kebijakan/peraturan pendukung. Kelima fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, artinya meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang potensial di masyarakat, dan Keenam

⁴ Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, *Booklet Keuangan Inklusif*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2014), 4.

perlindungan konsumen, agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi maupun memanfaatkan jasa keuangan yang ditawarkan.

Perbankan merupakan agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu sebagai lembaga perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sebagai lembaga intermediasi, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro yang kemudian dana yang telah terhimpun tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (bank syariah) atau kredit (bank konvensional) baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Penyaluran dana yang bersifat produktif akan memberikan dampak terhadap peningkatan kegiatan produksi. Sedangkan penyaluran dana yang bersifat konsumtif akan berdampak terhadap peningkatan konsumsi masyarakat. Kedua kegiatan ini secara bersama-sama akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berimplikasi pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Inilah yang kemudian menjadikan Industri perbankan sebagai sendi perekonomian yang memegang peranan penting di Indonesia.

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998, dimana Bank Umum adalah bank yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan dan

berlandaskan pada prinsip syariah (hukum) islam. Pembentukan Perbankan syariah didasari atas larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan tambahan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana sistem yang dijalankan pada perbankan syariah tidak seperti apa yang dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tentunya tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem Perbankan Syariah Indonesia dimulai tahun 1992 dengan digulirkannya UU No. 7/1992 yang memungkinkan bank menjalankan operasional bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Pada tahun yang sama lahir bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sampai dengan tahun 1998 bank syariah tidak berkembang. Baru setelah diluncurkan *Dual Banking System* melalui UU No. 10/1998, perbankan syariah mulai menggeliat naik. Dalam 5 tahun sejak diberlakukan *Dual Banking System*, pelaku bank syariah bertambah menjadi 10 bank, 2 bank merupakan entitas mandiri (BMI dan Bank Syariah Mandiri) dan lainnya merupakan unit/divisi syariah bank konvensional. Menurut data statistik perbankan syariah 2017, hingga tahun 2017 tercatat ada 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 21 Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia.⁵

Indonesia merupakan bangsa Muslim terbesar dengan perkiraan penduduk sebesar 255,46 juta orang pada 2015, dimana 87,18% di antaranya merupakan penduduk muslim. tetapi pengembangan produk syariah belum

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 2017.

berkembang sebagaimana halnya bank konvensional. Hal ini dapat dilihat dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa Per Desember 2016 *market share* perbankan syariah mencapai 5,33%, terdiri dari BUS sebesar 69,52%, UUS sebesar 27,98% dan BPRS sebesar 2,5%. Meningkat sebesar 0,46% dari 4,87% pada tahun 2015. *Market share* perbankan syariah masih jauh dari bank konvensional yang mencapai 94,67%, tetapi pertumbuhan aset perbankan syariah menunjukkan perkembangan tiap periode. Aset perbankan syariah di tahun 2016 tercatat meningkat sebesar Rp61,6 triliun, atau tumbuh 20,28%. Dalam publikasi *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2016*, disebutkan perbankan syariah Indonesia saat ini menjadi salah satu kontributor perkembangan perbankan syariah global yang diestimasi memiliki total aset sebesar \$1,9 triliun di akhir tahun 2016.⁶

Dengan perkembangan sektor perbankan syariah yang semakin tumbuh, tentunya menunjukkan bahwa pemerintah juga serius mendorong kemajuan perbankan syariah untuk ikut terlibat dalam meningkatkan perekonomian kelas bawah maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses institusi keuangan formal. Seharusnya akses penduduk terhadap lembaga keuangan formal menjadi lebih mudah. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang memiliki hambatan dalam mengakses lembaga keuangan, terutama bank syariah.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*, (OJK ; Jakarta, 2016), 3-4.

Masih sulitnya akses permodalan yang menyentuh sampai lapisan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentu tidak sejalan dengan konsep *financial inclusion* yang sedang digalakan pemerintah melalui Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. *Financial inclusion* menjadi suatu hal yang menarik karena diusung untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dengan pendalaman akses keuangan ke daerah-daerah terutama terhadap masyarakat menengah bawah. Perbankan syariah selaku perpanjangan tangan lembaga keuangan formal berusaha untuk menjadi *intermediary institution* dalam mengimplementasikan keuangan inklusif yang bertujuan untuk pemerataan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga terwujudlah pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Berdasarkan pemaparan data, fakta, dan fenomena yang ada, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Pengaruh *Financial Inclusion* dan Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah serta dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, didapat Identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Minimnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil sehingga sangat sulit untuk mendapatkan akses lembaga keuangan formal

yang disebabkan oleh gap kemiskinan antar provinsi, suku bunga kredit mikro yang tinggi dan kurangnya kemampuan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah untuk menjangkau permodalan. Beberapa permasalahan tersebut yang membuat pentingnya pengaplikasian *Financial Inclusion* di Indonesia.

2. Perkembangan perbankan syariah beberapa dekade telah menunjukkan pertumbuhan yang baik. Akan tetapi posisi perbankan syariah sekarang ini masih jauh apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan syariah juga mempunyai tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi negara. Dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, seharusnya perbankan syariah mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan skema pembiayaan yang dimilikinya.
3. Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan tulang punggung ekonomi nasional dalam menghadapi goncangan ekonomi global. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia paling banyak juga berasal dari tenaga kerja Usaha Mikro Kecil Menengah. Akan tetapi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih banyak yang merasakan kesulitan untuk mengakses permodalan maupun kebutuhan lainnya. Melihat potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sangat besar tersebut maka tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia

membutuhkan peran serta pemerintah maupun perbankan untuk mampu tumbuh dan berkembang.

4. Pertumbuhan ekonomi nasional beberapa tahun terakhir mengalami naik turun, atau dapat dikatakan masih jalan ditempat. Hal ini tentunya dikarenakan oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan-kebijakan pemerintah, perkembangan perbankan, maupun faktor-faktor yang lain.

Dari identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Pembatasan masalah ini mengandung konsep pemahaman sebagai berikut:

- a. *Financial Inclusion* dan pembiayaan perbankan syariah dalam penelitian ini merupakan variabel eksogen atau variabel independen. Yang mana kedua variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel yang lain yaitu Perkembangan UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi, namun tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model.
- b. Usaha Mikro Kecil Menengah dan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini merupakan variabel endogen, yang mana Usaha Mikro Kecil Menengah dipengaruhi secara langsung oleh *Financial Inclusion* dan pembiayaan perbankan syariah dalam model. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara langsung oleh perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan secara tidak langsung oleh *Financial Inclusion* dan

pembiayaan perbankan syariah melalui perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Financial Inclusion* terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Financial Inclusion* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Inclusion* terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Inclusion* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

E. Hipotesis Penelitian

Dasar perumusan hipotesis dalam penelitian ini diambil dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Adapun rumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bassey Ina Ibor, et al., menunjukkan bahwa *financial inclusion* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap operasi dan pertumbuhan UMKM di Nigeria.⁷ Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hedwigis Esti Riwayati, simpulan hasil penelitiannya menyatakan bahwa *financial inclusion* berpengaruh positif terhadap UMKM di Indonesia.⁸ Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yekeen dkk., simpulan hasil penelitiannya menyatakan bahwa *financial inclusion* berpengaruh positif terhadap UMKM.⁹

⁷ Bassey Ina Ibor, Amenawo Ikpa Offiong, Enyeokpon Samuel Mendie, *Financial Inclusion and Performance of Micro, Small And Medium Scale Enterprises In Nigeria*, (International Journal of Research - Granthaalayah Vol.5 (Iss.3): March, 2017), 104-122.

⁸ Hedwigis Esti Riwayati, *Financial Inclusion of Business Players in Mediating the Success of Small and Medium Enterprises in Indonesia*, (International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.7, No.4, 2017), 623-627.

⁹ Yekeen Adebayo Salman, G.T. Ayo-Oyebiyi, and Ogechi A. Emenike, *Influence of Financial Inclusion on Small And Medium Enterprises Growth and Development In Nigeria*, (International Journal in Management and Social Science, Vol.3, No.4, 2015), 390-401.

H₁ : Terdapat pengaruh positif *financial inclusion* terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Hasil penelitian yang dilakukan M. Andi Prayogi dan Lukman H. Siregar, menyatakan bahwa bahwa variabel pembiayaan mikro syariah berpengaruh signifikan terhadap pembangunan tingkat UMKM Bisnis di PT. Cabang BRI Syariah Medan.¹⁰ Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Afkar, simpulan hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pembiayaan Bank Syariah berpengaruh signifikan terhadap pengembangan UMKM.¹¹ Didukung lagi oleh penelitian yang dilakukan oleh Aldesta yang menyimpulkan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah di Kota Depok.¹²

H₂ : Terdapat pengaruh signifikan pembiayaan perbankan syariah terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Onaolopo, yang menyatakan bahwa *financial inclusion* memiliki dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.¹³ Penelitian juga dilakukan oleh Dewi Kustika Ningrum menyimpulkan bahwa *financial inclusion* (Inklusi Keuangan) secara uji parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

¹⁰ M. Andi Prayogi dan Lukman H. Siregar, *Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, (EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 17 No. 2, 201, 2017), 121-131.

¹¹ Taudlikhul Afkar, *Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Umkm), Dan Kecukupan Modal Terhadap Kemampuan Mendapatkan Laba Dari Aset Perbankan Syariah Di Indonesia*, (al-Uqud: Journal of Islamic Economics Vol. 1 No. 2, 2017), 183-201.

¹² Aldesta Nurika Perwitasari Tunas, Lukytawati Anggraeni, dan Deni Lubis, *Islamic Financing Influence towards Micro Small Medium Enterprises in Depok*, (Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 2, No. 1, 2017), 1-16.

¹³ Onaolopo A.R., *Effects of Financial Inclusion on Te Economic Growth of Nigeria (1982-2012)*, (International Journal of Business and Management Review, Volume 3, No 8, 2015), 11-28.

ekonomi di Jawa Timur.¹⁴ Penelitian juga didukung oleh Yilmaz dan Marius, penelitiannya menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara *financial inclusion* dengan pertumbuhan ekonomi.¹⁵

H₃ : Terdapat pengaruh positif *financial inclusion* terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanna, menyatakan bahwa Pembiayaan Mikro Bank Syariah di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap variabel indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹⁶ Penelitian juga didukung oleh Salahuddin dkk. penelitiannya menyimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹⁷

H₄ : Ada pengaruh signifikan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam penelitian Siswati menyimpulkan bahwa perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (tenaga kerja, investasi dan nilai produksi) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.¹⁸ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Bunga dan Sopi menyatakan bahwa perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berpengaruh positif dan

¹⁴ Dewi Kustika Ningrum, *Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Ketimpangan Di Jawa Timur Periode Tahun 2011- 2015*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB , Volume 6, No 1, 2017),1-16.

¹⁵ Yilmaz Bayar and Marius D. Gavrilletea, *Financial Inclusion And Economic Growth: Evidence From Transition Economies of European Union*, (Journal of International Finance and Economics, Vol.18, No.2, 2018), 95-100..

¹⁶ Hanna 'Ulyauz Zakkiyah, *Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 81.

¹⁷ Salahuddin El Ayyubi, Lukytawati A. dan Almira Dyah M., *The Effect of Islamic Banking to Economic Growth in Indonesia*, (Jurnal Al-Muzara'ah, Vol.5, No.2, 2017), 88-106.

¹⁸ Siswati Rachman, *Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar*, (Ad'ministrare, Vol. 3, No. 2, 2016), 71-82.

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif.¹⁹ Penelitian juga didukung oleh Grisejda dan Kacani. penelitiannya menyimpulkan bahwa perkembangan UMKM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Albania.²⁰

H₅ : Ada pengaruh positif dan signifikan perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

F. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bukti empirik mengetahui Pengaruh *financial Inclusion* dan pembiayaan mikro perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM serta dampaknya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi tambahan wacana dan referensi untuk mengembangkan keilmuan di bidang perbankan syariah maupun ekonomi makro.

Lebih kusus hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bukti empirik dan dapat memberikan kontribusi pengembangan keilmuan sebagai berikut

1. Menambah bukti empirik tentang Pengaruh *Financial Inclusion* terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.
2. Menambah bukti empirik tentang Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.

¹⁹ Bunga Aditi and Sopi Pentana, *Analysis of Influence of Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) Development as a Competitive Advantage to Creative Economic Development*, (Academic Journal of Economic Studies, Vol. 4, No. 3, 2018), 122-132.

²⁰ Grisejda Myslimi and Krisdela Kacani, *Impact of SMEs in Economic Growth in Albania*, (European Journal of Sustainable Development, Vol. 5 No. 3, 2016), 151-158.

3. Menambah bukti empirik pengujian pengaruh *Financial Inclusion* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
4. Menambah bukti empirik pengujian pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
5. Menambah bukti empirik pengujian pengaruh perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan pemerintah guna mewujudkan keuangan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menumbuhkan kembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah di masyarakat dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan bisnis perbankan syariah di Indonesia khususnya dalam penyaluran pembiayaan mikro.

G. Penegasan Istilah

Dari identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Pembatasan masalah ini mengandung konsep pemahaman sebagai berikut:

1. Yang dimaksud *Financial Inclusion* adalah Kemampuan nasabah mengakses perbankan dimanapun dan kapanpun serta penggunaan produk jasa keuangan. Adapun Indikator *Financial Inclusion* adalah Indeks Inklusi Keuangan Konvensional dan Indeks Inklusi Keuangan Syariah Indonesia.

2. Yang dimaksud pembiayaan mikro perbankan syariah disini adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah kepada nasabah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Indikator Pembiayaan Perbankan Syariah adalah Pembiayaan Modal Kerja sektor UMKM dan Pembiayaan Investasi sektor UMKM.
3. Yang dimaksud peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu sesuai dengan undang-undang. Indikator Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah perkembangan tenaga kerja UMKM dan ekspor non migas.
4. Yang dimaksud Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional maupun provinsi. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah data Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan jumlah ekspor (migas dan non migas).